

PENGEMBANGAN KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN SOSIAL EKONOMI KELUARGA DALAM RANGKA MEMPERKOKOH KETAHANAN NASIONAL

POLICY DEVELOPMENT OF FAMILY EMPOWERMENT IN SOCIAL ECONOMIC TO GAIN NATIONAL RESILIENCE ESTABLISHMENT

B. Mujiyadi

Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI.
Jl. Dewi Sartika No. 200 Cawang Jakarta
E-mail: bmujiyadi@yahoo.co.id

Accepted: 27 Januari 2015 Revised: 2 Maret 2015 Approved: 20 Maret 2015

Abstract

The study is the assessment on socio-economic empowerment policies and social resilience in the level of the families targeted. By the use descriptive-evaluative approach, this study intends to identify the fulfillment level of minimum basic needs in every family as well as to gain a model to empower the family's social resilience. A family structure is the smallest unit in social system with various functions such as: reproduction, affection, security, education, religious, socio-culture, environmental development, economy, recreation and social control. Somehow, in some poor families, those functions can't be run optimally. They lack capability of fulfilling their basic needs consisting of physical, psychological, social and spiritual needs. The worse condition has been experienced by the poorest families. Due to their less income, they can't fulfill their very basic needs, such as: food, clothes and shelter. To enhance their ability, they should be empowered. As an entry point, they should be empowered in terms of social and economy. By social and economic enhancement, they are assured to gain better welfare level so that they are capable to optimizing their family functions. By normal social functions of each family, it is possible for them to gain national resilience.

Keywords: *family function, empowerment, social resilience.*

Abstrak

Studi ini merupakan kajian atas kebijakan pemberdayaan sosial dan ekonomi keluarga serta kondisi ketahanan sosial pada keluarga. Dengan pendekatan deskriptif-evaluatif, studi ini dimaksudkan untuk mendalami tingkat pemenuhan kebutuhan dasar minimum bagi setiap keluarga serta menemukan alternatif kebijakan dalam rangka meningkatkan ketahanan sosial keluarga. Keluarga merupakan unit terkecil dalam sistem kemasyarakatan, yang mempunyai berbagai fungsi bagi setiap insan di dalamnya. Namun demikian, oleh karena sesuatu hal maka fungsi-fungsi dimaksud tidak dapat berjalan secara optimal. Terdapat keluarga-keluarga yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar minimumnya yang meliputi kebutuhan fisik, psikis, sosial dan spiritual. Kondisi yang lebih parah dialami keluarga yang karena kecilnya pendapatan, maka keluarga dimaksud tidak mampu memenuhi kebutuhan yang sangat minimal seperti pangan, sandang dan papan. Dalam rangka terpenuhinya pemenuhan kebutuhan dasar maka keluarga-keluarga dimaksud perlu diberdayakan. Sebagai tahap awal, keluarga itu perlu diberdayakan dari aspek sosial dan ekonominya. Dengan meningkatnya keberdayaan sosial ekonomi, keluarga dimaksud diharapkan akan dapat mencapai peningkatan kesejahteraannya, yang ditandai dengan terwujudnya keluarga yang kokoh dan mampu melaksanakan fungsinya secara optimal. Keluarga yang dapat melaksanakan fungsinya secara optimal akan memperkuat ketahanan nasional.

Kata kunci: *fungsi keluarga, pemberdayaan, ketahanan nasional*

PENDAHULUAN

Pemberdayaan (*empowerment*), merupakan konsep yang lahir sebagai bagian dari perkembangan alam pikiran masyarakat dan kebudayaan Barat, utamanya Eropa. Konsep pemberdayaan mulai tampak ke permukaan sekitar dekade 1970-an, dan terus berkembang hingga akhir abad 20 (Pranarka & Moeljarto, 1996). Pemberdayaan masyarakat sebagai strategi pembangunan digunakan dalam paradigma pembangunan berpusat pada manusia. Perspektif pembangunan ini menyadari betapa pentingnya kapasitas manusia dalam rangka meningkatkan kemandirian dan kekuatan internal atas sumber daya materi dan nonmaterial melalui redistribusi modal atau kepemilikan. Namun demikian, oleh karena berbagai keterbatasan maka sebagian anggota masyarakat belum mampu menggapai tingkat keberdayaan yang memadai. Keterbatasan ini berkaitan dengan kecilnya asset yang dimiliki serta keterbatasan akses yang dapat dijangkau dalam upaya peningkatan kapasitas. Oleh karenanya, sebagai target pemberdayaan, peningkatan kapasitas manusia perlu ditingkatkan sedemikian rupa agar asset yang dimiliki bertambah dan semakin mampu menjangkau akses dalam rangka meningkatnya keberdayaan.

Sebagai suatu strategi pembangunan, pemberdayaan didefinisikan sebagai kegiatan membantu klien untuk memperoleh daya guna mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan dilakukan, terkait dengan diri mereka termasuk mengurangi hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang dimiliki dengan mentransfer daya dari lingkungannya (Payne:1997. Sementara itu Ife (1995) memberikan batasan pemberdayaan sebagai upaya penyediaan kepada orang-orang

atas sumber, kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan untuk meningkatkan kemampuan mereka menentukan masa depannya dan untuk berpartisipasi di dalam dan mempengaruhi kehidupan komunitas mereka.

Dalam perspektif pemberdayaan, masyarakat diberi wewenang untuk mengelola sendiri dana pembangunan baik yang berasal dari pemerintah maupun dari pihak lain, disamping mereka harus aktif berpartisipasi dalam proses pemilihan, perencanaan, dan pelaksanaan pembangunan (Sutrisno, 2000). Sejalan dengan pemikiran itu, Kusnaka (Hikmat, 2001) mengemukakan, dalam konsep pemberdayaan, masyarakat tidak hanya mengembangkan potensi ekonomi rakyat, tetapi juga peningkatan harkat dan martabat, rasa percaya diri dan harga dirinya, serta terpeliharanya tatanan nilai budaya setempat. Pemberdayaan sebagai konsep sosial budaya yang implementatif dalam pembangunan yang berpusat pada rakyat, tidak saja menumbuhkan dan mengembangkan nilai tambah ekonomi, tetapi juga nilai tambah sosial dan budaya.

Pemberdayaan masyarakat dalam perspektif pekerjaan sosial, (Dubois & Miley, 1992) memberikan pedoman, yaitu: a) Membangun relasi pertolongan yang merefleksikan respon empati, menghargai pilihan dan hak klien dalam menentukan nasibnya sendiri, menghargai perbedaan dan keunikan individu, dan menekankan kerjasama klien; b) membangun komunikasi yang menghormati martabat dan harga diri klien, mempertimbangkan keragaman individu, berfokus pada klien, dan menjaga kerahasiaan klien; c) Terlibat dalam pemecahan masalah yang memperkuat partisipasi klien dalam semua aspek proses pemecahan masalah, menghargai hak-hak klien, merangkai tantangan melalui ketaatan terhadap kode etik profesi, keterlibatan dalam pengembangan profesional, riset, dan perumusan kebijakan, penerjemahan

kesulitan-kesulitan pribadi ke dalam isu-isu publik, dan penghapusan segala bentuk diskriminasi dan ketidaksetaraan kesempatan, tantangan sebagai kesempatan belajar, dan melibatkan klien dalam pembuatan keputusan dan evaluasi; d) Merefleksikan sikap dan nilai profesi pekerjaan sosial.

Masyarakat merupakan sekumpulan keluarga-keluarga yang berada dalam satu wilayah tertentu. Berangkat dari hal tersebut, maka pemberdayaan masyarakat dalam tulisan ini lebih bertitik tekan kepada pemberdayaan keluarga. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992, baik keluarga inti maupun keluarga besar mempunyai fungsi yang antara lain meliputi: fungsi reproduksi, fungsi afeksi, fungsi perlindungan, fungsi pendidikan, fungsi keagamaan, fungsi sosial budaya, fungsi sosialisasi, fungsi pengembangan lingkungan, fungsi ekonomi, fungsi rekreasi dan fungsi kontrol sosial. Fungsi-fungsi dimaksud, apabila dilestarikan, dioptimalkan, diberdayakan dan digunakan dalam membangun keluarga akan didapatkan keluarga yang mempunyai ketahanan sosial tinggi. Dalam tulisan ini, dari fungsi-fungsi dimaksud, fungsi sosial dan ekonomi yang diyakini sebagai *entry point* dalam pemberdayaan keluarga.

Menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1992, ketahanan keluarga adalah kondisi dinamik suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung fisik material dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin. Kondisi ketahanan keluarga yang ingin dicapai adalah kondisi kesejahteraan dan keamanan.

Artinya perlu didukung oleh penyelenggara negara dari tingkat yang paling tinggi hingga

aparat di lapisan paling bawah. Undang-Undang dimaksud mengamanatkan adanya Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah diikuti peraturan di bawahnya yang sifatnya mengikat untuk dilaksanakan. Pelaksanaannya, perlu dikembangkan berbagai kebijakan dan strategi yang dapat dijadikan pedoman untuk pelaksanaannya. Akan halnya dalam pemberdayaan keluarga ditetapkan berbagai kebijakan yang menuntun ke arah meningkatnya kesejahteraan keluarga.

Kebijakan dan strategi yang tepat diharapkan keluarga-keluarga terentaskan dari masalahnya dan dapat meraih tingkat kesejahteraan sosialnya sesuai harkat kemanusiaan. Kebijakan dan strategi ini dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan yang secara praktis dapat memberdayakan keluarga baik dari aspek sosial maupun ekonominya. Program dan kegiatan ini dilaksanakan melalui penguatan kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan dasarnya serta pendampingan sosial agar keluarga sasaran pemberdayaan lebih mampu secara sosial maupun ekonomis. Pemberdayaan sosial dan ekonomis ini diyakini sebagai *entry point* menuju pada terpenuhinya fungsi keluarga secara utuh, menuju pada meningkatnya taraf kesejahteraan. Apabila kesejahteraan keluarga meningkat maka dipastikan ketahanan sosial keluarga dimaksud akan makin kokoh pula.

Pemerintah telah merancang berbagai program pemberdayaan keluarga dan penanganan kemiskinan, baik secara nasional maupun sektoral. Dalam konteks Kementerian Sosial, telah dirancang dan diimplementasikan program penanganan kemiskinan, seperti: Proyek Bantuan Kesejahteraan Sosial (BKS), Program Kesejahteraan Sosial KUBE (Prokesos KUBE), Program Bantuan Sosial Fakir Miskin (BSFM), Program Asistensi Kesejahteraan Keluarga dan lainnya. Namun demikian berbagai program dimaksud belum

mampu mengatasi masalah yang ada dan belum mampu meningkatkan kesejahteraan penerima manfaat. Implementasinya, program-program tersebut masih sering terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya: salah sasaran, terciptanya benih-benih fragmentasi sosial, dan belum menyentuh akar permasalahan dan lain sebagainya. Atas dasar asumsi itu, dalam rangka penyempurnaan kebijakan di masa mendatang, maka perlu dilihat secara utuh apakah program dimaksud dapat mengatasi permasalahan yang ada. Kebijakan dan program pengentasan Fakir Miskin dan Pemberdayaan Sosial Ekonomi Keluarga yang telah diluncurkan perlu ditelaah apakah sudah menjawab permasalahan yang ada. Apakah strategi pembagian wilayah konsentrasi di daerah terpencil, perdesaan, pinggiran kota, perkotaan, pantai, pinggiran hutan, wilayah perbatasan dan wilayah industri serta jenis bantuan yang diberikan maupun pendampingan sudah dilaksanakan sesuai dengan panduannya? Bagaimana tingkat efektivitas dan efisiensinya?

Telaah kebijakan menggunakan pendekatan kualitatif. Telaah ini dilakukan atas kebijakan pemberdayaan keluarga mendalami program dan kegiatan yang ada serta telaah atas ketahanan sosial keluarga. Studi ini lebih bersifat teoritis dengan mengaji pustaka yang ada. Dari hasil telaah dimaksud maka guna pengembangan kebijakan diajukan alternatif kebijakan yang diharapkan mampu meningkatkan jangkauan serta hasil yang lebih memadai.

PEMBAHASAN

Fungsi Keluarga

Keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat memiliki fungsi yang multi aspek. Apabila dicermati secara mendalam masing-masing fungsi akan memberikan kontribusi yang sangat signifikan terhadap pemberdayaan keluarga. Fungsi-fungsi dimaksud intinya

meliputi: a) Fungsi reproduksi, yang mencakup kegiatan melanjutkan keturunan secara terencana sehingga menunjang terciptanya kesinambungan dan kesejahteraan sosial keluarga; b) Fungsi afeksi, meliputi kegiatan untuk menumbuh-kebangkan hubungan sosial dan kejiwaan yang diwarnai kasih sayang, ketentraman dan kedekatan; c) Fungsi perlindungan, yaitu menghindarkan anggota keluarga dari situasi atau tindakan yang dapat membahayakan atau menghambat kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan secara wajar; d) Fungsi pendidikan, mencakup kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan maupun sikap dan perilaku anggota-anggota keluarga guna mendukung proses penciptaan kehidupan dan penghidupan keluarga yang sejahtera; e) Fungsi keagamaan yaitu kegiatan untuk meningkatkan hubungan anggota keluarga dengan Tuhan Yang Maha Esa, sehingga keluarga dapat menjadi wahana persemaian nilai-nilai keagamaan guna membangun jiwa anggota keluarga yang beriman dan bertaqwa; f) Fungsi sosial budaya yaitu kegiatan yang ditujukan untuk melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai sosial budaya guna memperkaya khasanah budaya maupun integrasi sosial bangsa dalam rangka menciptakan kesejahteraan sosial keluarga; g) Fungsi Sosialisasi, mencakup kegiatan yang ditujukan untuk menanamkan dan mengembangkan nilai-nilai sosial/kebersamaan bagi anggota keluarga guna menciptakan suasana harmonis dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Melalui sosialisasi yang dilakukan keluarga, anak dapat mempelajari bagaimana berpikir, berbicara dan mengikuti adat istiadat, perilaku dan nilai di dalam masyarakat; h) Fungsi pengembangan lingkungan, yaitu kegiatan yang ditujukan untuk memberdayakan anggota keluarga guna melestarikan, memberdayakan dan meningkatkan daya dukung lingkungan, baik lingkungan fisik maupun lingkungan

sosial dalam rangka menciptakan keserasian antara kehidupan alam dan manusia; i) Fungsi ekonomi, yaitu kegiatan mencari nafkah, merencanakan, meningkatkan pemeliharaan dan mendistribusikan penghasilan keluarga guna meningkatkan dan melangsungkan kesejahteraan keluarga; j) Fungsi rekreasi, yaitu kegiatan mengisi waktu senggang secara positif guna terciptanya suasana santai diantara keluarga sebagai upaya untuk mengoptimalkan pendayagunaan energi fisik dan psikis; dan h) Fungsi kontrol sosial, yaitu menghindarkan anggota keluarga dari perilaku menyimpang, serta membantu mengatasinya guna menciptakan suasana kehidupan keluarga dan masyarakat yang tertib, aman dan tenteram.

Sekian aspek fungsi di atas, apabila dicermati maka titik strategis untuk dikembangkan adalah dari unsur sosial dan ekonomi. Unsur sosial ekonomi menempati posisi dasar dalam kelangsungan sebuah keluarga. Apabila fungsi ini tidak berjalan dengan baik, hampir keseluruhan fungsi lainnya menjadi kurang baik pula.

Suatu keluarga dikatakan memiliki ketahanan dan kemandirian yang tinggi bila keluarga itu dapat berperan optimal dalam mewujudkan seluruh potensi anggota-anggotanya. Karena itu tanggung jawab keluarga meliputi tanggung jawab terhadap pemenuhan kebutuhan dasar keluarga yang meliputi kebutuhan fisik, psikis, sosial dan spiritual. Perspektif yang sangat minim, kebutuhan dimaksud berupa terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang dan papan. Selain itu keluarga perlu terjamin dalam hal kesehatan anggota keluarga, pendidikan, ekonomi, sosial budaya dan lainnya. Optimalnya fungsi keluarga maka dipastikan ketahanan keluarga dapat terjalin dengan kokoh.

Melalui ketahanan keluarga yang kokoh dalam masyarakat, diharapkan permasalahan

sosial baru dapat dicegah. Sebaliknya melalui kondisi ketahanan sosial yang kokoh dalam keluarga, diharapkan dapat dijadikan sarana penciptaan mekanisme pemecahan masalah sosial dalam masyarakat.

Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat, berbangsa dan bernegara. Apabila ketahanan keluarga dapat terwujud, ketahanan masyarakat tercapai pula. Secara linear, apabila masyarakatnya memiliki kesejahteraan yang tinggi dan memiliki ketahanan sosial yang tinggi, maka ketahanan nasional akan tercapai pula.

Untuk pengembangan peran keluarga, fungsi sosial ekonomi masih dipandang perlu dioptimalkan sedemikian rupa. Kebijakan di bidang pengembangan sosial ekonomi hingga saat ini, berkisar pada memosisikan keluarga-keluarga sebagai sasaran, sementara dalam konsep pemberdayaan keluarga mempunyai peran yang cukup signifikan. Pemberdayaan yang sudah dilaksanakan meliputi Pemberdayaan Fakir Miskin, Bantuan Langsung Tunai, Program Keluarga Harapan, Asistensi Kesejahteraan Keluarga dan lain-lain. Kebijakan tentang pelaksanaan kegiatan-kegiatan dimaksud belum mampu mencapai hasil yang optimal.

Fungsi sosial ekonomi berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar minimum sebuah keluarga. Dalam fungsi ini tercakup unsur pemenuhan kebutuhan pangan, sandang dan papan. Unsur ini merupakan pemenuhan dasar sebuah kehidupan. Manusia harus mampu memenuhi kebutuhan pokoknya, dimana pangan harus terpenuhi sedikitnya 2100 kalori per orang per hari bahkan WHO menyebut 2400 per orang per hari. Tentu saja diperlukan asupan gizi yang seimbang, atau pada masa lampau dikenal dengan dengan slogan 4 sehat 5 sempurna. Manusia perlu karbohidrat minimal

400 gram per hari, kemudian sayur mayur dalam jumlah tertentu, protein atau lauk pauk, buah-buahan hingga minum susu.

Pemenuhan kebutuhan sandang, manusia perlu terpenuhi dari kebutuhan sehari-hari baik untuk di rumah maupun untuk bekerja. Kemudian untuk keperluan lain yang perlu diadakan tersendiri. Sedangkan untuk kebutuhan papan, manusia perlu adanya tempat untuk berteduh, beristirahat dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga berikutnya. Apabila kebutuhan dasar dimaksud sudah terpenuhi, maka manusia cenderung untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup lainnya, seperti kesehatan, pendidikan, sosialisasi dan lainnya. Di sinilah sejumlah fungsi keluarga menduduki peranan sangat penting agar keluarga berfungsi sebagaimana adanya untuk berkehidupan sosial secara wajar.

Apabila sebuah keluarga tidak dapat memenuhi kebutuhan minimal secara wajar, maka perlu adanya sentuhan pihak lain, termasuk dalam hal ini penyelenggara negara. Sesuai amanat dalam Pembukaan UUD 1945, bahwa dibentuknya negara adalah untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa, ketertiban umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan perdamaian abadi.

Pemberdayaan Keluarga

Keluarga tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya karena kemiskinan, kecacatan dan keterlantaran. Kementerian Sosial dalam rencana strategisnya menetapkan sasaran strategis dari kemiskinan, keterlantaran, ketunaan sosial, kecacatan dan bencana. Kondisi miskin, maka anggota keluarga tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Seorang anak yang tinggal dalam keluarga miskin akan menjadi terlantar dan tidak terpenuhi kebutuhan minimum untuk berkembang ke usia yang lebih dewasa secara wajar. Apabila sudah dewasa, anak dimaksud bila tidak memiliki kemampuan

dikawatirkan akan menjadi pengemis atau gelandangan dan bahkan melakukan tindak kriminal. Pada tahap selanjutnya apabila tidak teratasi maka mungkin sekali akan berakibat yang lebih fatal. Kemudian masalah ini akan berkembang dalam penyalahgunaan perilaku sosial, termasuk penyimpangan sosial. Antisipasi akan terjadinya akibat yang lebih buruk, maka keluarga miskin dimaksud perlu diberikan pemberdayaan. Pemberdayaan dimaksud dapat dilaksanakan melalui penguatan dari aspek ekonomi dan sosialnya. Tahap awal, keluarga sasaran diberikan penguatan untuk bisa mendapatkan penghasilan dalam rangka memenuhi kebutuhan dasarnya. Oleh karenanya setiap keluarga perlu adanya *income generating* untuk pemenuhan kebutuhan keluarganya.

Apabila keluarga tidak memiliki keberdayaan untuk *income generating*, maka diperlukan dukungan pihak lain atau singkatnya disebut pemberdayaan. Menurut pendekatan Tampubolon (2006) dalam konsepnya *ABCCM Empowerment Concept*, ada 8 faktor yang mempengaruhi keberhasilan pemberdayaan. Lima faktor utama yang merupakan faktor eksistensi pemberdayaan, meliputi: a) Aset (*asset*); b) Kemampuan atau keterampilan (*ability*); c) Kemasyarakatan (*community*) yang berkaitan dengan nilai, aturan dan norma masyarakat; d) Komitmen (*commitment*); dan e) Pasar (*market*). Tiga faktor lainnya yang mempengaruhi kedinamisan pemberdayaan, disebut faktor kedinamisan pemberdayaan, meliputi: a) Pendampingan (*guide*); b) Jaringan kerjasama (*networking*); dan c) Inovasi (*innovation*). Kedelapan faktor ini harus ada dalam pemberdayaan, sehingga pemberdayaan tersebut dapat berjalan dan berkembang dengan baik.

Menurut Ginanjar (1997) memberdayakan masyarakat adalah sebagai upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan

masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Kerangka pikir yang digunakan antara lain: 1) Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang; 2) Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat; 3) Penguatan pranata dan pelembagaan pranata; dan 4) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

Kemiskinan sangat terkait dengan berbagai latar belakang baik yang ada dari dalam diri masyarakat maupun lingkungannya yang meliputi aspek sosial budaya, sumber daya, kondisi alam dan lain-lain. Kemiskinan di Indonesia setidaknya mempunyai 4 dimensi pokok yakni: a) Kurang kesempatan; b) Rendah kemampuan; c) Kurang jaminan; dan d) Ketidakberdayaan. Dilihat dari empat dimensi dimaksud, para penyandang fakir miskin tidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya, kebutuhan sosialnya serta kebutuhan akan aktualisasi diri secara layak.

Indikator dari masing-masing kebutuhan dapat dilihat dari beberapa hal yang meliputi: Pertama, Ketidak-mampuan memenuhi kebutuhan pokok yang layak dengan indikator: a) Penghasilan rendah yang diukur dari tingkat pengeluaran per orang per bulan; b) Ketergantungan pada bantuan orang lain; c) Keterbatasan kepemilikan pakaian yang cukup setiap anggota keluarga; d) Tidak mampu membiayai pengobatan jika ada salah satu anggota keluarga yang sakit; dan e) Tidak mampu membiayai pendidikan dasar 9 tahun bagi anggota keluarganya. Ke dua Kebutuhan sosial dengan indikator: a) Kurangnya hubungan saling percaya, kerukunan dan kebersamaan antar anggota; b) Kurangnya hubungan saling pengertian dan kebersamaan dengan warga sekitar; c) Kurangnya hubungan saling percaya dengan aparat pemerintahan; dan e) Kurangnya

hubungan saling menguntungkan dengan mitra usaha. Ke tiga Kebutuhan akan aktualisasi diri dengan indikator: a) Tidak mampu lagi bekerja; b) Tidak mampu lagi berkarya, karena kesulitan dana, fasilitas atau mengakses sistem sumber; dan c) Tidak dapat lagi mengembangkan usahanya, karena isolasi geografis, kurangnya sarana dan prasarana penunjang.

Penyelenggara pemberdayaan sosial ekonomi keluarga, kebijakan yang ada, perlu dikembangkan dengan berorientasi pada peningkatan akses keluarga terhadap sumber daya sosial-ekonomi, peningkatan prakarsa dan peran aktif warga masyarakat dalam pemberdayaan keluarga, perlindungan hak-hak dasar warga masyarakat dan peningkatan kualitas manajemen pemberdayaan keluarga. Untuk mendukung pengembangan kebijakan dimaksud, dilaksanakan dengan strategi yang meliputi: partisipasi sosial, pengembangan budaya kewirausahaan, pengembangan budaya menabung, kemitraan sosial, advokasi sosial, penguatan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan, serta aktualisasi nilai-nilai spiritual dan kearifan lokal.

Partisipasi sosial yang dimaksud dalam kerangka ini ialah peningkatan peran keluarga agar bukan hanya berperan sebagai sasaran pemberdayaan, tetapi juga berpartisipasi serta berkontribusi dalam peningkatan kesejahteraan sosialnya. Kenyataan selama ini keluarga diletakkan pada posisi sebagai obyek yang dikenai perlakuan. Idealnya, keluarga mempunyai peran yang dapat ikut menentukan arah pemberdayaan bagi keluarganya. Hal ini perlu memperoleh perhatian mengingat keluarga mempunyai aset dan potensi yang dapat dikembangkan.

Adapun pengembangan budaya kewirausahaan adalah bahwa keluarga diharapkan mampu melakukan kegiatan baik yang

bernuansa produksi maupun pemasarannya. Berkaitan dengan hal tersebut perlu dilakukan berbagai jenis peningkatan ketrampilan yang berorientasi pada kerja produktif dan mempunyai nilai jual.

Sedangkan pengembangan budaya menabung adalah bahwa keluarga dibimbing untuk tidak terlalu konsumtif, dan diarahkan menyisihkan hasil kerjanya demi pengembangan usahanya. Diharapkan para keluarga dapat menatap hari esok ke arah peningkatan kesejahteraannya. Untuk ini diperlukan adanya pengembangan fasilitas yang memberikan kemudahan bagi masyarakat, seperti lembaga perbankan, lembaga Usaha Kecil Menengah dan sebagainya.

Adapun yang dimaksud kemitraan sosial adalah bahwa keluarga perlu mendapatkan dan menjalin akses ke berbagai pihak, baik dalam jaringan kerja, modal maupun pengembangan usaha serta pemasarannya. Kebijaksanaan yang diperlukan dalam hal ini adalah tersedianya lembaga-lembaga pemberian kredit, pemasaran serta akses transportasi yang memadai.

Sedangkan Advokasi sosial adalah semua keluarga diberikan fasilitas dan perlindungan serta jaminan usaha agar mereka dapat bekerja secara optimal dan meningkatkan produksinya hingga pemasaran yang mudah. Diperlukan berbagai aturan dan kebijakan yang melindungi kenyamanan bekerja dan usaha bagi keluarga peserta program.

Di sisi lain, penguatan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan juga perlu ditingkatkan sedemikian rupa, sering dengan tantangan kebutuhan yang semakin besar. Para petugas di lembaga-lembaga yang menangani pemberdayaan perlu ditingkatkan kemampuannya melalui pendidikan dan pelatihan yang berorientasi teknologi tepat guna dan tepat sasaran.

Aktualisasi nilai-nilai spiritualitas dan kearifan lokal juga dipandang sebagai hal yang sangat menentukan dalam pemberdayaan keluarga. Dalam hal ini, masyarakat mempunyai keleluasaan dalam berinisiatif serta menentukan aktualisasi diri sesuai dengan nilai dan budaya setempat.

Pemberdayaan diperlukan kebijakan yang dapat diaplikasikan secara mudah. Untuk ditetapkannya sebuah kebijakan terlebih dahulu perlu adanya kerangka berpikir logis (*logical framework*) sejak memetakan kondisi awal sasaran pemberdayaan, *input, proses, output, outcome, impact* serta tujuan dari kegiatannya. Tentu saja perlu dikenali terlebih dahulu kondisi sasaran melalui *needs assessment* dan *potency assesment* yang dapat dijadikan dasar langkah berikutnya.

Dengan pengembangan kebijakan yang berorientasi pada sosial ekonomi keluarga yang mencakup: 1) Peningkatan akses keluarga terhadap sumber daya sosial ekonomi; 2) Peningkatan prakarsa dan peran aktif warga masyarakat dalam pemberdayaan keluarga; 3) Perlindungan hak-hak dasar warga negara; dan 4) Peningkatan kualitas manajemen pemberdayaan keluarga; dan secara rinci digambarkan dalam gambaran pemberdayaan seperti diurai di atas, perlu kiranya didukung semua pihak dalam implementasinya. Unsur pemerintah di tingkatan yang paling atas hingga di tingkat pelaksana di lapangan perlu mendukung kebijakan dimaksud dalam bentuk jejaring kerja baik formal maupun informal.

Kebijakan yang dilaksanakan dalam kaitan pemberdayaan keluarga saat ini, dalam implikasinya dirasakan masih kurang memadai. Hal ini disebabkan program dan kegiatan lebih banyak ditentukan dari atas, kurang memperhatikan kebutuhan dan potensi keluarga sebagai sasaran pemberdayaan, dan

tidak disertai pendampingan yang memadai. Sesungguhnya, pemberdayaan pada setiap pihak yang menjadi sasaran, perlu didahului dengan analisis kebutuhan serta potensi yang ada baik pada diri si penerima manfaat maupun potensi di sekitarnya. Berdasarkan analisis kebutuhan tersebut, maka diberikan stimulasi agar tiap penerima manfaat memiliki kemampuan memberdayakan diri. Pada saat yang sama dilakukan pendampingan dari pihak luar. Pada gilirannya setiap penerima manfaat dapat mengaktualisasikan potensi yang ada dan mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya.

Memperhatikan kondisi seperti terurai di atas maka dipandang perlu adanya pengembangan kebijakan yang lebih berdaya guna dan berhasilguna.

Pemberdayaan Keluarga dalam Memperkokoh Ketahanan Nasional

Ketahanan nasional adalah kondisi dinamik bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi, berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional, dalam menghadapi dan mengatasi segala ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam, untuk menjamin identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mencapai tujuan nasional. Kondisi nasional akan memiliki daya tahan, apabila unsur di dalamnya tangguh. Unsur dimaksud meliputi ketahanan dalam masyarakat dan yang lebih kecil lagi adalah keluarga. Ketahanan keluarga dimaksud dapat tercapai apabila keluarga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya yang meliputi kebutuhan fisik, psikis, sosial dan spiritual.

Ketahanan nasional yang dibangun atas empat pilar tata laku yaitu kesejahteraan dan

keamanan, menyeluruh terpadu, mawas ke dalam dan keluar, kekeluargaan. Apabila kebutuhan dasar terpenuhi, maka diyakini bahwa kemungkinan terjadinya gangguan kemanan akan terminimalisir. Tentu saja terpenuhinya kebutuhan dasar tersebut hendaknya juga dirasakan oleh semua unsur dalam masyarakat. Selanjutnya, dengan terpenuhinya kebutuhan dasar setiap unsur dalam masyarakat, maka akan saling menghargai satu dengan lainnya. Semua bersama-sama membangun kegotongroyongan dan mewujudkan kesatuan yang harmonis. Semua ini akan mengantarkan pada kondisi ketahanan nasional yang mantap dan berdaya guna.

Wujud ketahanan nasional digambarkan dalam ketahanan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan. Menopang terwujudnya ketahanan nasional dimaksud, peran keluarga sangat signifikan. Oleh karena itu diperlukan upaya pemberdayaan sejak kebijakan sampai dengan implikasinya di lapangan guna menunjang ketahanan nasional dimaksud. Sebagai *entry point*, pemberdayaan yang dilakukan melalui penguatan di bidang sosial dan ekonomi dari setiap anggota masyarakat. Pemberdayaan keluarga dari aspek sosial ekonomis, secara rinci disampaikan dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan dari tulisan ini.

PENUTUP

Deskripsi dan analisis di atas dapat disimpulkan bahwa keluarga akan dapat berperan dengan optimal apabila fungsi keluarga dapat berjalan dengan baik. Keberfungsian dimaksud dimulai dari kuatnya kondisi sosial dan ekonomi keluarga itu. Apabila kondisi sosial dan ekonomi baik, maka peran keluarga akan semakin baik. Optimalnya peran keluarga, ketahanan sosial terjamin. Lebih dari itu, ketahanan nasional akan terwujud. Diperlukan

pengembangan kebijakan pemberdayaan keluarga melalui *entry point* penguatan sosial ekonomi dalam rangka menuju tercapainya ketahanan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Rukminto, Isbandi. (2001). *Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat Danintervensi Komunitas (Pengantar pada Pemikiran dan Pendekatan Praktis)*. Jakarta: FE-UI.
- Departemen Sosial RI. (2004a). *Faktor-faktor Penghambat Perkembangan Potensi Sosial Masyarakat Lokal di Daerah Miskin* Jakarta: Pusbangtansosmas.
- (2004b). *Kemiskinan dan Keberfungsian Sosial – studi Kasus Rumah Tangga Miskin di Indonesia*. Jakarta: Kerjasama Puslitbang UKS dengan STKS Bandung.
- (2005). *Prioritas Penanganan Permasalahan Kesejahteraan Sosial di Enam Propinsi*. Jakarta: Pusat Penelitian Permasalahan Sosial.
- (2006). *Pedoman Umum Program Pemberdayaan Fakir Miskin – Tahun Anggaran 2006*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial
- DuBois, Brenda and Karla Krogsrud Miley. (1992). *Social Work: An Empowering Profession*. Boston: Prentice Hall
- Hikmat, Harry. (2001). *Strategi pemberdayaan masyarakat*. Bandung: Humaniora Utama.
- (2006). *Metodologi Penelitian Sosial: Pendekatan dan Implikasi Pilihan Metode dan Teknik*. Bandung: STKS.
- Ife, Jim. (1995). *Community Development: Creating Community Alternatives-Vision, Analysis and Practice*: Australia, Longman Pty Ltd.
- Irmayani dkk. (2006). *Indikator Kesejahteraan Sosial Keluarga*. Jakarta: Pusbangtansosmas.
- Kartasasmita, Ginanjar. (1997). *Pemberdayaan Masyarakat: Konsep Pembangunan yang Berakar pada Masyarakat*. (Disampaikan pada Sarasehan DPD Golkar Tk I Jawa Timur, Surabaya 14 Maret 1997).
- Payne, M. (1997). *Modern Social Work Theory: A Critical Introduction* (2nd ed), Basingstoke: Macmilan
- Pranarka, A.M.W. & Moeljarto, Vindyandika. (1996). *Pemberdayaan (Empowerment). Pemberdayaan, Konsep dan Implementasi*. Jakarta: CSIS.
- Soetrisno, Loekman. (1995). *Menuju Masyarakat Partisipatif*. Yogyakarta: Kanisius.
- Strahm H. Rudolf. (1999). *Kemiskinan Dunia Ketiga*. (Penerjemah Rudy Bagindo dkk). Jakarta: Pustaka Cisendo.
- Suharto, Edi. (2005). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat - Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Tampubolon, Joyakin. (2006). *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pendekatan Kelompok Kasus Pemberdayaan Masyarakat Miskin melalui Pendekatan Kelompok Usaha Bersama (KUBE)*. (Disampaikan pada Seminar Pembahasan Rancangan Penelitian Puslitbangkesos TA 2006.)